

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah mendasar yang secara umum timbul baik di negara berkembang maupun di negara miskin. Kemiskinan absolut mengacu pada standar yang konsisten dan tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau negara.²Seseorang termasuk orang yang benar-benar miskin jika hasil pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhinya kebutuhan hidup yang pokok. Sedangkan, kemiskinan relatif merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat sebagai akibat dari kebijakan pembangunan yang tidak dapat menjangkau seluruh orang strata masyarakat, menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan.³

Kemiskinan menjadi suatu problematika sosial yang memiliki multidimensi (saling berkesinambungan dalam berbagai aspek kehidupan), sehingga kemiskinan akan memberikan dampak buruk pada aspek pendidikan, politik, sosial, hingga kesehatan.⁴ Kemiskinan digambarkan sebagai suatu kondisi di mana masyarakat atau individu tidak mampu

²Titik Kurnianingsih, *APBN Dimensi Kemiskinan*, from https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan20130130135844.pdf accessed on 24 February 2023

³Vania Grace Sianturi, M. Syafii, and Ahmad Albar Tanjung. "Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019)." *Jurnal Samudra Ekonomika* 5.2 (2021), hlm. 125-133.

⁴Latif Syaipudin, "Contribution of Young Entrepreneurs in Building the Creative Economy of Village Communities," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 12.1 (2023), hlm. 80-98.

menghadapi situasi kehidupan yang kekurangan, lemah dan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi seperti ini sering kita jumpai di Indonesia. Menghadapi masalah kemiskinan pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan.

Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga masyarakat miskin akan kesulitan untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan masyarakat kaya atau berkecukupan. Hal tersebut dapat memicu peningkatan angka pengangguran.⁵Situasi ini digambarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) sejak 2018-2022 dengan persentase kemiskinan di Indonesia yang masih termasuk dalam kategori tinggi, akan dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 1. 1 Profil Kemiskinan di Indonesia per September 2018-2022



(Sumber: *Berita Resmi Statistik*)

⁵Rudy Susanto and Indah Pangesti, "Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7.2, (2021), hlm. 271-278.

Sebagaimana data dari Berita Resmi Statistik, pada periode terhitung per September 2018 sampai 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami naik dan turun yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2020 sampai 2021 disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan kembali.⁶

Melihat masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki serangkaian program dalam mengentaskan kemiskinan.⁷Pemerintah berusaha mengentaskan kemiskinan dengan cara melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang terkena dampak kemiskinan.⁸Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha.⁹

Pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat

⁶Latif Syaipudin, "Efektifitas Media Komunikasi di Tengah Pandemi: Respon Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung," *Kalijaga Journal of Communication*, 1.2 (2019): hlm. 165-178.

⁷Dudi Septiadi and Muhammad Nursan, "Pengentasan kemiskinan Indonesia: Analisis Indikator Makro Ekonomi dan Kebijakan Pertanian," *Jurnal Hexagro* 4.1 (2020): 1-14.

⁸Latif Syaipudin and Idah Nurfajriya Awwalin. "Analysis Traditional Market Revitalization for Economic Improvement of Kras Market Kediri." *MAR-Ekonomi: Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Rumpun Ilmu Ekonomi* 1.2 (2023): hlm. 32-41.

⁹Vania Grace Sianturi, M. Syafii, and Ahmad Albar Tanjung. "Analisis Determinasi Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019)." *Jurnal Samudra Ekonomika* 5.2 (2021): hlm. 125-133

orang keluar dari kemiskinan secara permanen.¹⁰ Mendukung orang yang terkena kemiskinan kronis dengan memperkuat dan mencegah kemiskinan baru. Adapun program pengentasan kemiskinan antara lain; jangka pendek (penyediaan bahan pokok, seperti bantuan langsung tunai), jangka menengah (jaminan sosial seperti BPJS) dan jangka panjang (pengembangan budaya usaha seperti pinjaman modal).¹¹

Membahas perihal program jangka panjang, pinjaman modal diberikan pada masyarakat dengan maksud masyarakat mampu mengelola potensi ekonomi di daerahnya dan mampu untuk melakukan perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat. Mengacu pada UU No. 32 tahun 2004 (terkhusus pasal 213 dan 214) melalui pelebagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masyarakat diberdayakan untuk mengoptimalkan potensi desa dengan tujuan untuk mengentaskan masyarakat dari masalah kemiskinan melalui potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Berlandaskan undang-undang tersebut BUMDes dapat berperan positif dengan memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup.¹² Pemberdayaan BUMDes mencakup proses pemberdayaan potensi desa dalam rangka pembangunan

¹⁰ Nurlaila Hanum, "Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kota Langsa (Studi Kasus Gampong Matang Seulimeng)," Jurnal Samudra Ekonomika, 2.2 (Oktober 2018): hlm. 162

¹¹ Latif Syaipudin, and Idah Awwalin. "Strategi Promosi melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam Meningkatkan Penjualan pada Home Industry Baso Aci Mahira Lamongan," *Sanskara Manajemen dan Bisnis* 1.1, (2022) hlm. 31-42.

¹² Herry Azhar P and Siska Fitriyani, "Pemberdayaan dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa," Jurnal Kebijakan Pembangunan. 14.2 (Desember, 2019): hlm. 134

desa melalui konsep “dari, oleh dan untuk masyarakat”. Melalui pola partisipatif ini desa dapat berdikari dalam sektor ekonomi.¹³

Penelitian Ni Putu Cahya menjelaskan bahwa ketersediaan barang juga menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat kemiskinan. Menurut Fedderke dan Bogetic ketersediaan infrastruktur (barang) juga sangat berpengaruh dalam menunjang kegiatan ekonomi, seperti terjadinya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor manufaktur, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita dari masyarakat miskin.¹⁴ Sebagai upaya menyokong ketersediaan barang, BUMDes harus bergerak secara *trading* dengan cara menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.¹⁵

Berdasarkan penelitian dari Nurlaila Hanum, faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan bagi masyarakat desa adalah distribusi hasil bumi. Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus sehingga tingkat produktivitas menjadi rendah.¹⁶ Oleh karena itu, sebagai pemilik sumber daya alam yang melimpah desa sepatutnya mendistribusikan hasil

¹³ Herry Azhar P and Siska Fitriyani,

¹⁴ Ni Putu Cahya Agung Tika Meidina and A.A.I.N. Marhaeni, ”Pengaruh Kepemilikan Aset, Ketersediaan Infrastruktur, dan Pendidikan terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin,” Buletin Studi Ekonomi. 24.1, (Februari 2019): hlm. 54

¹⁵ Abdulah kafabih, ”Analisis Peran Modal Sosial Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) terhadap Pengentasan Kemiskinan,” OECONOMICUS Journal Of Economics, 5.1, (Desember 2018), hlm. 60

¹⁶ Nurlaila Hanum, hlm 162

buminya untuk mencegah kelangkaan dan meningkatkan pendapatannya. Guna mensukseskan distribusi hasil bumi BUMDes memiliki peran sebagai *brokering* (lembaga perantara) yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar.¹⁷

Sedangkan apabila mengaju pada aspek syariah, Islam memiliki konsep tersendiri dalam menjalankan perekonomian yang disebut dengan ekonomi syariah yang memiliki acuan untuk mencapai *fallah* (kebahagiaan di dunia dan akhirat) sebagaimana yang menjadi tujuan umat Islam melalui dimensi komersial dan filantropis. Kaitannya dengan pinjaman modal, ketersediaan barang dan distribusi hasil bumi, Islam memiliki prinsip yang harus diterapkan oleh badan usaha yang dikenal dengan istilah *Model Islamic Entrepreneurship*.

Islamic entrepreneurship menjadi suatu pemanfaatan potensi ekonomi dengan berlandaskan syariat Islam. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan dalam melaksanakan usaha, beliau bersabda "*Hendaklah kamu melakukan perdagangan, karena di dalam perdagangan tersebut terdapat sembilan puluh pintu rezeki yang dapat terbuka*".¹⁸ Membahas terkait *Islamic entrepreneurship* sendiri mengacu pada *socioentrepreneurship* yang terbagi menjadi dua dimensi, yakni dimensi komersil yang menekankan pada perolehan laba dan dimensi filantropis yang membahas perihal kemaslahatan umat. Dimensi ini memiliki

¹⁷ Abdulah Kafabih, hlm 63

¹⁸ Wahyu Utomo, Syah Aji, Havis Ravik, *Islamic Entrepreneurship Konsep Berwirausaha Illahiyah*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), hlm 76

kesamaan dengan BUMDes yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa PP Nomor 11 Tahun 2021.

BUMDes Junjung Makmur memiliki program kerja berupa pemberian pinjaman modal, menyediakan bibit bawang, dan mengumpulkan hasil panen bawang dari masyarakat untuk didistribusikan ke pasar. Jasa yang ditawarkan oleh BUMDes Junjung Makmur mengacu pada ranah gerak BUMDes pada aspek aspek *banking*, *trading* dan *brokering*. Program kerja ini selaras dengan pasal 1 ayat 6 UU No.6 /2014 tentang Desa, BUMDes diharuskan memiliki barang atau jasa yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Indonesia sendiri memiliki penduduk dengan mayoritas beragama muslim, sudah sewajarnya jika *Islamic entrepreneurship* dapat diterapkan dalam menjalankan sektor perekonomian. Terlebih pada BUMDes yang menjadi lembaga (badan usaha) yang dibentuk pemerintah sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Mengacu pada tiga peranan BUMDes dalam mengentaskan BUMDes melalui aspek *banking*, *trading* dan *brokering*, BUMDes Junjung Makmur memiliki program kerja yang mencakup ketiga aspek tersebut dengan cara memberikan pinjaman modal, menyediakan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat dan menjadi lembaga perantara masyarakat dalam memasarkan hasil buminya. Selain itu, BUMDes Junjung Makmur juga memiliki dimensi komersial dan filantropis yang serupa dengan konsep *Islamic entrepreneurship*. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul penelitian “Pengaruh Pinjaman

Modal, Ketersediaan Barang, dan Distribusi Hasil Bumi terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui *Model Islamic Entrepreneurship* di BUMDes Junjung Makmur Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. BUMDes Junjung Makmur dalam memberikan modal pinjaman terhadap pengentasan kemiskinan sudah tersalurkan dengan baik akan tetapi belum merata kepada seluruh masyarakat yang kemudian dilakukan penambahan tim atau petugas untuk memberikan informasi modal pinjaman.
2. BUMDes Junjung Makmur dalam memberikan ketersediaan barang terhadap pengentasan kemiskinan sudah selalu memenuhi target akan tetapi terkadang stok ketersediaan masih terlambat yang kemudian dilakukan pembagian bantuan sesuai ketersediaan barang.
3. BUMDes Junjung Makmur dalam mendistribusikan hasil bumi terhadap pengentasan kemiskinan sudah terdistribusi kepada seluruh masyarakat akan tetapi terkadang mengalami keterlambatan pendistribusian yang kemudian diberikan kebebasan untuk pengambilan bantuan secara mandiri.
4. BUMDes Junjung Makmur dalam memberikan modal pinjaman berdasarkan *Model Islamic Entrepreneurship* terhadap pengentasan

kemiskinan sudah berjalan lancar akan tetapi belum seluruhnya sesuai *Model Islamic Entrepreneurship* maka kemudian diberikan pengarahan melalui program diklat anggota tentang pentingnya menerapkan *Model Islamic Entrepreneurship*.

5. BUMDes Junjung Makmur dalam memberikan ketersediaan barang berdasarkan *Model Islamic Entrepreneurship* terhadap pengentasan kemiskinan sudah berjalan sesuai model akan tetapi ketersediaan barang masih belum sepenuhnya diterapkan maka kemudian diberikan arahan kepada petugas tentang *Model Islamic Entrepreneurship*.
6. BUMDes Junjung Makmur dalam mendistribusikan hasil bumi berdasarkan *Model Islamic Entrepreneurship* terhadap pengentasan kemiskinan sudah terdistribusi secara merata tetapi belum sepenuhnya sesuai *Model Islamic Entrepreneurship* maka kemudian dilakukan penerapan bisnis sesuai *Model Islamic Entrepreneurship*.
7. BUMDes Junjung Makmur dalam *Model Islamic Entrepreneurship* terhadap pengentasan kemiskinan sudah diterapkan akan tetapi belum sepenuhnya membantu maka kemudian dilakukan kajian ulang tentang pengentasan kemiskina sesuai syariah.
8. BUMDes Junjung Makmur dalam memberikan modal pinjaman terhadap *Model Islamic Entrepreneurship* sudah diterapkan akan tetapi belum semua masyarakat dapat mendapatkan modal pinjaman maka kemudian dilakukan himbauan sesuai syariah agar mendapatkan keberkahan.

9. BUMDes Junjung Makmur dalam memberikan ketersediaan barang terhadap *Model Islamic Entrepreneurship* sudah disediakan tetapi terkadang kelengkapan masih kurang maka kemudian dilakukan kajian ulang agar *Model Islamic Entrepreneurship* dapat memberikan keberkahan dalam bisnis.
10. BUMDes Junjung Makmur dalam mendistribusikan hasil bumi terhadap *Model Islamic Entrepreneurship* sudah terdistribusi akan tetapi belum semua sesuai *Model Islamic Entrepreneurship* maka kemudian dilakukan pendistribusian melalui bantuan lembaga syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah.

1. Apakah pinjaman modal berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di BUMDes Junjung Makmur?
2. Apakah ketersediaan barang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di BUMDes Junjung Makmur?
3. Apakah distribusi hasil bumi berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di BUMDes Junjung Makmur?
4. Apakah pinjaman modal berdasarkan *Model Islamic Entrepreneurship* berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di BUMDes Junjung Makmur?

5. Apakah ketersediaan barang berdasarkan *Model Islamic Entrepreneurship* berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di BUMDes Junjung Makmur?
6. Apakah distribusi hasil bumi berdasarkan *Model Islamic Entrepreneurship* berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di BUMDes Junjung Makmur?
7. Apakah *Model Islamic Entrepreneurship* berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan?
8. Apakah pinjaman modal berpengaruh terhadap *Model Islamic Entrepreneurship*?
9. Apakah ketersediaan barang berpengaruh terhadap *Model Islamic Entrepreneurship*?
10. Apakah distribusi hasil bumi berpengaruh terhadap *Model Islamic Entrepreneurship*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pinjaman modal, ketersediaan dan barang, distribusi hasil bumi terhadap pengentasan kemiskinan melalui *model Islamic entrepreneurship* pada BUMDes Junjung Makmur.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat supaya pembahasan penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu

mengidentifikasi pengaruh pinjaman modal, ketersediaan dan barang, distribusi hasil bumi terhadap pengentasan kemiskinan melalui *model islamic entrepreneurship* pada BUMDes Junjung Makmur.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan dapat digunakan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh pinjaman modal, ketersediaan barang, dan distribusi hasil bumi terhadap pengentasan kemiskinan melalui *model islamic entrepreneurship* pada BUMDes Junjung Makmur. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pelengkap dari kekurangan dalam penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya pada penelitian sejenis.

2. Manfaat Praksis

Manfaat secara praksis dari penelitian ini ditujukan bagi pemerintah desa ataupun instansi yang terkait yaitu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi atau pengendalian mengenai pengelolaan BUMDes yang terkait serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengentaskan kemiskinan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk memaksimalkan peranan BUMDes sehingga dapat membantu meningkatkan angka pendapatan desa terkait, sehingga dapat

mengentaskan masalah kemiskinan di daerah terkait. Tentunya hal ini berdasarkan nilai yang terkandung dalam ajaran *Islamic Entrepreneurship* sebagaimana yang telah dipaparkan pada penelitian ini.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pinjaman Modal

Pinjaman modal adalah dana yang digunakan sebagai modal (pokok) usaha, pengeluaran dana komoditi dan sebagainya, yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Pinjaman modal dapat diperoleh melalui bank, lembaga keuangan non-bank atau lembaga lainnya.¹⁹

b. Ketersediaan Barang

Menurut Kotler, ketersediaan barang adalah kemampuan perusahaan untuk menjaga persediaan produk ketika terjadi peningkatan permintaan terhadap suatu produk. Terbatasnya pasokan barang dapat memicu ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran yang menyebabkan kenaikan harga barang.²⁰

¹⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 11

²⁰ Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 17

c. Distribusi

Menurut Farrel dan Hartline, distribusi merupakan suatu sistem intuitif pemasaran produk, informasi, dana dan arus kepemilikan produk yang terorganisir dari produsen kepada konsumen.²¹ Distribusi memiliki peran yang krusial dalam bidang penjualan. Kepuasan konsumen akan timbul ketika konsumen dapat dengan mudah mengakses barang yang mereka butuhkan di sekitar lingkungannya. Secara sederhana, dapat dipahami bahwa distribusi adalah suatu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen.

d. *Islamic Entrepreneurship*

Islamic Entrepreneurship adalah dalam menjalankan aktivitas dagangnya tanpa melupakan hubungannya dengan Allah SWT (*hablumminallah*) dalam hal beribadah supaya keuntungan yang didapatkan menjadi berkah (*fallah*). *Islamic Entrepreneurship* ini dititikberatkan pada berdagang yang mengikuti Alquran dan Hadis yang tercermin mulai dari transaksi hingga pada konsumsi.²²

e. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi individu yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang

²¹ Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran*, edisi 2, (Banten: Universitas Terbuka, 2011), hlm 82

²² Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pessindo, 2013), hlm 3-6

layak, atau dengan kata lain keadaan masyarakat yang berada di garis bawah standar kemiskinan.²³

f. BUMDes

Mengacu pada pasal 1 ayat 6 UU No.6 /2014 tentang Desa, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan. desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

2. Definisi Operasional

a. Pinjaman Modal

Pinjaman modal adalah pengadaan dana atau sumber finansial dari pihak eksternal (BUMDes) yang digunakan untuk pengembangan usaha masyarakat.

b. Ketersediaan Barang

Ketersediaan barang adalah jumlah dan ketersediaan komoditas yang disiapkan oleh BUMDes untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan masyarakat pada suatu waktu tertentu.

c. Distribusi Hasil Bumi

Distribusi Hasil Bumi adalah proses penyaluran dan pemerataan produk pertanian dan alam kepada konsumen atau

²³ Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*, (Rajagrafindo, Jakarta: 2016), hlm. 68

pasar dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung perekonomian.

d. *Islamic Entrepreneurship*

Islamic Entrepreneurship adalah praktik kewirausahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk etika, moral, dan prinsip keuangan syariah dalam pengelolaan usaha untuk tujuan keuntungan dan keberkahan.

e. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ekonomi masyarakat yang ditandai oleh kekurangan sumber daya finansial, akses terbatas ke kebutuhan dasar, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kehidupan layak.

f. BUMDes

BUMDes merujuk pada entitas hukum yang dimiliki oleh desa yang bertujuan mengembangkan potensi ekonomi lokal, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan desa.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika kepenulisan ini dibuat untuk mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi secara sistematis yang telah disesuaikan dengan format kepenulisan skripsi yang disediakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang terdiri dari tiga bagian sebagai berikut: *Pertama*, Bagian Awal. Bagian ini terdiri dari sampul, halaman judul, halaman persetujuan,

motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

Kedua, Bagian Utama. Bagian ini terdiri berisi sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Landasan Teoritis. Pada bab ini memaparkan kajian teori yang dikumpulkandari buku atau sumber lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan dari penelitian ini.
3. Bab III Metode Penelitian. Bab ini membahas terkait metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dan memberikan gambaran terkait lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan serta analaisis datadan langkah-langkah dalam penelitian.
4. Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini berisi terkait paparan dari uraian data hasil penelitian berupa hasil uji data yang didapat melalui pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan rumusan masalah.
5. Bab V Pembahasan. Bagian ini berisi terkait pembahasan dari hasil penelitian yang memuat pengaruh dari setiap variabel yang ada.
6. Bab VI Penutup. Pada bab ini berisi terkait kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

Ketiga, Bagian Akhir. Bagian ini terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.